

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL

Paulus Ifon Jantua Tumanggor, R Slamet Santoso

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimilie (024) 7465045

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang semakin pesat, tentunya juga diikuti oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut membawa dampak perubahan terhadap lingkungan. Salah satunya adalah masalah sampah. Sampah yang dihasilkan oleh manusia memiliki pengaruh terhadap terjadinya perubahan lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan sampah ditujukan agar sampah dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal dan merumuskan alternatif kebijakan terbaik sebagai upaya dalam menangani permasalahan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal menggunakan teori ketepatan implementasi Riant Nugroho yang dibagi dalam lima tepat yaitu 1) Tepat Kebijakan, 2) Tepat Pelaksana, 3) Tepat Target, 4) Tepat Lingkungan dan 5) Tepat Proses. Dalam merumuskan alternatif kebijakan menggunakan teori proses analisis kebijakan Bridgman dan Davies yang terdiri dari lima tahapan yaitu 1) Formulasi Masalah Kebijakan, 2) Merumuskan Tujuan dan Sasaran, 3) Mengidentifikasi Parameter Kebijakan, 4) Mencari Alternatif-Alternatif Kebijakan dan 5) Memutuskan Alternatif Kebijakan Terpilih. Parameter yang digunakan adalah parameter dari Patton dan Sawicky yang mengajukan ada empat kriteria dalam menilai alternatif kebijakan yaitu kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan finansial, kelayakan politik dan kelayakan administratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal yang dijelaskan menggunakan teori Ketepatan Implementasi masih belum menyelesaikan masalah yang terjadi. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal adalah masalah jumlah sampah yang dari waktu ke waktu semakin bertambah dan jumlah sampah yang dikelola tidak dapat mencapai 50% dari jumlah keseluruhan sampah yang ada. Faktor penyebab

terjadinya masalah tersebut disebabkan oleh : 1) Armada sarana dan prasarana yang belum memadai, 2) Terbatasnya dana anggaran, 3) Petugas kebersihan yang belum cukup memadai dan 4) Tingkat kesadaran masyarakat akan peduli sampah masih rendah.

Kata Kunci : Analisis, Ketepatan Implementasi, Parameter, Alternatif Kebijakan

ABSTRACT

The times are growing rapidly, also followed by a growing population. The population growth impacts on the environmental changes. Waste is the one of the problems here. Waste generated by humans has an influence on the occurrence of environmental changes. The purpose of the implementation of waste management is that waste can be managed properly to create a clean and healthy environment. This study describes the implementation of waste management in Tegal Regency and formulates the best policy alternatives as an effort to deal with the problem of implementing waste management in Tegal Regency. The research method used is descriptive qualitative. The theory used to describe the implementation of waste management in Tegal Regency using Riant Nugroho's Theory of Accuracy in Implementation that divided into five 1) Right Policy, 2) Right Implementer, 3) Right Target, 4) Right Environment and 5) Right Process. In formulating policy alternatives using the theory of the process of policy analysis and Davies Bridgman consisting of five stages, namely 1) Formulation of Policy Issues, 2) Formulate Goals and Objectives, 3) Identifying the policy parameters, 4) Looking for Policy Alternatives and 5) Decide Selected Policy Alternatives. The parameters used are the parameters of Patton and Sawicky who propose that there are four criteria in assessing alternative policies, namely technical feasibility, economic and financial possibilities, political feasibility and administrative feasibility.

The results showed that the implementation of waste management in Tegal Regency which was explained using the Theory of Accuracy in Implementation still had not solved the problem that occurred. The problems that occur in the implementation of waste management in Tegal Regency are the problem of the amount of waste that from time to time is increasing and the amount of waste that is managed cannot reach 50% of the total amount of waste that exists. The causes of the problems are caused by: 1) Fleet infrastructure is inadequate, 2) Lack of budgetary funds, 3) The cleaners were not sufficient, and 4) The level of public awareness of the care waste is still low.

Keywords: Analysis, Accuracy of Implementation, Parameters, Alternative Policies

A. PENDAHULUAN

Lingkungan adalah tempat dimana makhluk hidup melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka. Tentunya, di dalam melaksanakan aktifitas tersebut makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat serta suasana yang nyaman. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, tentunya juga membawa dampak perubahan terhadap lingkungan. Perkembangan zaman tersebut diikuti dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat. Salah satu masalah utama saat ini adalah masalah persampahan sebab manusia hidup menghasilkan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008).

Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat

dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar. Timbunan sampah tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang akibat dari semakin bertambahnya volume timbunan sampah.

Sistem persampahan yang umum dilaksanakan adalah sistem yang didasarkan atas premis kesehatan, yakni bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan, sehingga harus secepatnya dikumpulkan, diangkut dan dibuang agar dampak terhadap lingkungan yang diakibatkannya dapat diminimalkan. Masalahnya adalah umumnya sampah yang diangkut tidak menyeluruh, yakni hanya dapat mengangkut sekitar 70-80 % saja. Sampah yang tidak terangkut biasanya akan dibakar, dipendam atau dibuang di selokan maupun di sungai, sehingga menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar yang akibat fatalnya adalah dapat menyebabkan banjir.

Pemerintah di dalam melakukan pengelolaan sampah harus bijak dalam mengambil keputusan. Pemerintah dalam mengambil keputusan jika salah maka, pemerintah sendiri yang akan

kewalahan di dalam mengatasi persoalan persampahan. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan tentang sampah adalah Kabupaten Tegal. Hal ini dikarenakan jumlah banyak sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berikut adalah data jumlah volume produksi dan terangkut sampah di Kabupaten Tegal:

Tabel 1
Volume Produksi dan Sampah Terangkut di Kabupaten Tegal

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Volume Produksi Sampah (Ton)	Sampah Terangkut (Ton)	Persentase Terangkut (%)
1	2014	1.420.890	311.009	119.720	38,49
2	2015	1.424.890	312.051	143.080	45,85
3	2016	1.429.890	313.146	148.920	47,55
4	2017	1.433.098	313.848	149.078	47,50
5	2018	1.437.225	314.754	152.655	48,50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018

Berdasarkan data tabel di atas, produksi sampah di Kabupaten Tegal dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan volume. Hal ini sejalan dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Tegal.

Persentase sampah yang terangkut dari tahun 2014-2018 di Kabupaten Tegal tidak ada yang mencapai 50%. Maksudnya adalah sampah yang terangkut tidak mencapai

setengah (50%) dari volume sampah yang dihasilkan. Hal ini tentunya menjadi masalah serius karena sampah yang terangkut tentunya dapat menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya adalah masalah pencemaran lingkungan.

Sampah yang diproduksi atau dihasilkan oleh masyarakat tidak hanya dihasilkan oleh satu sumber saja. Berikut kategori sumber penghasil sampah di Kabupaten Tegal:

Tabel 2
Sumber Sampah di Kabupaten Tegal

No	Sumber Sampah	Persentase (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah Tangga	49.53	49.65	49.58	49.75	49.69
2	Pasar	19.82	19.97	20.37	20.41	20.41
3	Tempat Umum	10.36	10.28	10.25	10.30	10.39
4	Industri	10.27	10.30	10.31	10.35	10.42
5	Rumah Sakit	6.54	6.70	6.86	6.90	6.92
6	Tempat Lain	3.48	3.10	2.63	2.29	2.15

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018

Sumber sampah terbesar di Kabupaten Tegal tahun 2014-2018 berasal dari sampah rumah tangga dengan rata-rata persentase sebesar 50%, kedua berasal dari pasar sebesar 20%, ketiga berasal dari tempat umum sebesar 10%, keempat berasal dari sampah industri sebesar 10%, kelima

berasal dari rumah sakit sebesar 7% dan terakhir berasal dari tempat lain sebesar 3% (sampah yang berasal dari pepohonan, sapuan jalan dan bencana alam).

Dalam pengelolaan sampah tentunya sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat penting sebagai alat pendukung dalam menangani dan mengelola permasalahan sampah yang ada. Berikut di bawah ini data tentang sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal :

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal

No	Sarana dan Prasarana	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Dump Truck	15	17	20	20	23
2	Truck Arm Roll	3	4	4	4	4
3	Truck Tinja	2	3	4	4	4
4	Kontainer Sampah	20	25	26	30	26
5	Gerobag Dorong	50	65	70	90	102
6	Gerobag Becak	25	28	30	32	34
7	Kendaraan Roda Tiga	2	5	7	10	12
8	TPS	57	65	72	93	120
9	TPST	1	1	1	1	1
10	Komposter	200	237	350	120	120
11	Dozer	3	3	3	3	4
12	TPAS	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018

Kapasitas kemampuan dari Dump Truck dalam mengangkut sampah adalah sebesar 6-8 ton (2 rit/hari) dengan menggunakan 1 (satu) Dump Truck. Sarana pengangkut sampah yang lainnya adalah Arm Roll Truck dengan kapasitas mengangkut sampah sebanyak 4-5 ton (2 rit/hari) dengan menggunakan 1 (satu) Arm Roll Truck.

Data pada tabel tersebut, memaparkan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sudah disediakan namun belum mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada masih kurang memadai. Berikut permasalahan yang ada pada sarana dan prasarana pengelolaan sampah Kabupaten Tegal :

1. Dump Truck

Keterangan pada tabel sarana dan prasarana di atas, 1 (satu) unit Dump Truck mampu mengangkut sampah sebanyak 6-8 Ton/hari. Jadi dalam 1 (satu)

tahun Dump Truck hanya mampu mengangkut sampah sebanyak 2.555 Ton sampah. Total ada 23 unit Dump Truck pada tahun 2018, jadi volume sampah yang terangkut dari 23 unit Dump Truck adalah sebanyak 58.765 Ton sampah. Tentunya jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan volume sampah yang diproduksi tiap tahunnya.

2. Truck Arm Roll

Truck Arm Roll digunakan untuk mengangkut sampah dari sumber sampah menuju tempat pembuangan akhir. Keterangan pada tabel sarana dan prasarana, satu (1) unit Truck Arm Roll mampu mengangkut sampah sebanyak 4-5 Ton/hari. Satu (1) tahun Truck Arm Roll hanya mampu mengangkut sebanyak 1.825 Ton/tahun. Truck Arm Roll ada sebanyak 4 unit, maka volume sampah yang terangkut selama 1 (satu) tahun adalah 7.300 Ton/tahun. Tentunya jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan

dengan volume sampah yang diproduksi tiap tahunnya.

3. Kontainer

Kontainer adalah tempat pembuangan sementara sampah berupa bak sampah besar yang tertutup. Fakta yang sering ditemui dilapangan adalah kontainer sampah dalam keadaan penuh sesak dengan sampah. Keadaan kontainer yang sudah penuh sesak, tentunya berdampak pada sampah yang berceceran disekitar kontainer sampah.

4. Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang masih kurang

Data pada tabel tentang sarana dan prasarana, jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 berjumlah 120 unit. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dinilai masih belum mampu menangani permasalahan sampah yang ada. Pertama yang menjadi masalah adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak tersebar

secara merata. Hal ini disebabkan karena wilayah geografis Kabupaten Tegal yang cukup luas sehingga menyebabkan ada beberapa tempat yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Kedua adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada, seringkali tidak mampu menampung volume sampah yang diproduksi. Ketidakmampuan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tersebut akhirnya menyebabkan sampah berceceran di sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

5. Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS)

Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) sampah yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 1 (satu) unit. Adapun letak dari TPAS sampah tersebut berada di Penujah, Kecamatan Kedung Banteng. Hal ini menjadi masalah dikarenakan luas wilayah Kabupaten Tegal yang luas tentunya memakan waktu dan

biaya yang lebih besar untuk mengangkut dan mengantarkan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS). Volume sampah yang meningkat dari tahun ke tahun tentunya mengakibatkan Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) yang ada, tidak akan sanggup lagi menampung. Hal ini dikarenakan luas dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah juga terbatas.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam menangani masalah pengelolaan sampah, tentunya juga membutuhkan manusia untuk mengoperasikannya. Ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menangani permasalahan yang sampah di Kabupaten Tegal. Berikut adalah data jumlah sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal :

Tabel 4
Sumber Daya Manusia
(Human Resources)
di Kabupaten Tegal

No	Tahun	Petugas Kebersihan	Staff	Jumlah
1	2014	229	31	260
2	2015	321	33	354
3	2016	321	33	354
4	2017	295	18	313
5	2018	303	31	334

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018

Data pada tahun 2014-2018 tentang jumlah personil sumber daya manusia (*Human Resources*) mengalami peningkatan. Mengingat volume produksi sampah yang terus meningkat tentunya membutuhkan personil sumber daya manusia yang banyak juga. Permasalahan yang terjadi adalah petugas kebersihan yang tersedia hanya fokus beroperasi di wilayah Kota Slawi. Untuk wilayah di luar Kota Slawi diserahkan tanggung jawab kepada desa masing-masing. Masalah ini terjadi disebabkan karena personil petugas kebersihan masih kurang sehingga difokuskan hanya pada wilayah Kota Slawi saja karena wilayah Kabupaten Tegal yang luas.

Dalam pengelolaan sampah, masyarakat di Kabupaten Tegal ikut berpartisipasi dalam mengurangi jumlah sampah yang ada. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal melakukan kerjasama dengan masyarakat agar sampah yang ada di tiap-tiap daerah Kabupaten Tegal dikelola dan tidak dibiarkan begitu saja. Berikut adalah lembaga atau kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengurangi timbunan sampah :

Tabel 5
Lembaga atau Kegiatan
Pengurangan Timbunan Sampah
di Kabupaten Tegal

No	Lembaga/Kegiatan	Jumlah	Pengurangan Timbunan Sampah
1	Bank Sampah	83	863,20 ton/tahun
2	Pengepul	90	6.570,00 ton/tahun
3	TPS3R	1	1.825,00 ton/tahun
4	Pengomposan	72	210,00 ton/tahun
5	Lembaga Swadaya Lain	3	1,80 ton/tahun
6	Bp. Tarjani Desa Kudale	1	2.880,00 ton/tahun
	Jumlah		12.350,00 ton/tahun

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018

Data pada tabel di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal, masyarakat memiliki peran penting. Hasil nyata dari peran serta

masyarakat adalah mengurangi timbunan sisa sampah yang tidak terangkut. Pengurangan timbunan sampah tersebut dilakukan dengan berbagai macam lembaga ataupun kegiatan. Contoh kegiatannya seperti kegiatan bank sampah.

Berdasarkan pada permasalahan yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal dan merumuskan alternatif kebijakan terbaik sebagai upaya dalam menangani permasalahan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal.

B. KAJIAN TEORI

1. Ketepatan Implementasi

Riant Nugroho (2017: 761-765) tentang ketepatan implementasi. Pada dasarnya terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

1. Tepat Kebijakan

Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

2. Tepat Pelaksana

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*).

3. Tepat Target

Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak.

Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Variabel endogen yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan sebagai variabel eksogen yang terdiri dari *public opinion* yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Tepat Proses

Tepat Proses merupakan suatu kebijakan yang dilakukan sesuai dengan proses yang sudah ditentukan.

2. Proses Analisis Kebijakan Publik

Proses atau tahap analisis kebijakan menurut Bridgman dan Davis dalam buku Badjuri dan Yuwono (2002 : 65) antara lain sebagai berikut :

1. Formulasi Masalah Kebijakan

Formulasi masalah kebijakan merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan krusial karena jika dalam memfokuskan masalahnya tersebut salah atau tidak benar, maka kebijakan publik yang akan diterapkan juga tidak benar. Mengkaji suatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tahapan perumusan tujuan dan sasaran menjadi penting karena akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

3. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

Identifikasi parameter kebijakan merupakan hal penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah proposal kebijakan. Parameter - parameter kebijakan ini perlu di dalam lebih lanjut khususnya berkaitan dengan indikator-indikator pertanyaan seperti :

- 1) Apakah nasehat kebijakan yang disampaikan sesuai dan relevan dengan kondisi saat ini ?
- 2) Apakah nasehat kebijakan yang disampaikan menyediakan pandangan ke depan (*forward looking*) yang lengkap dan memungkinkan ?
- 3) Apakah nasehat kebijakan yang ditawarkan bisa mengantisipasi berbagai hal yang mungkin di kemudian hari ?

4) Apakah nasehat kebijakan yang disediakan menyediakan implikasi - implikasi (politis, ekonomis, lingkungan dan sebagainya) dari setiap pilihan alternatif?

5) Apakah nasehat kebijakan menyediakan strategi yang jelas dan realistis terhadap sebuah proposal kebijakan ?

6) Apakah nasehat kebijakan tersebut mudah dilaksanakan ?

4. Mencari Alternatif-Alternatif

Tahapan ini membutuhkan penelitian yang mendalam. Inti dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon (tanggapan) yang mungkin dilakukan.

5. Memutuskan Alternatif-Alternatif Pilihan

Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif dilakukan. Hal

ini berarti bahwa produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu pilihan, agar pihak pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan pilihan mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif-alternatif tentunya sangat diharapkan.

Dalam analisis kebijakan terdapat kriteria atau parameter kebijakan. Menurut Bardach sebagaimana dikutip oleh Patton dan Sawicki (1987 : 157-167) dalam buku AG. Subarsono (2005, 58-60) mengajukan empat kriteria dalam menilai alternatif kebijakan, yaitu:

1. Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*)

Apakah alternatif yang dipilih dapat mengatasi pokok persoalan yang muncul. Ini mencakup dua sub - kriteria yakni efektivitas (*effectiveness*) dan kecukupan (*adequacy*). Efektivitas menyangkut, apakah

alternatif yang dipilih dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedang kecukupan menyangkut seberapa jauh alternatif yang dipilih mampu memecahkan persoalan.

2. Kemungkinan Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial Possibility*)

Kriteria ini menyangkut : sub-kriteria *economic efficiency*, *profitability* dan *cost effectiveness*. Efisiensi ekonomi mempersoalkan apakah dengan menggunakan *resources* yang ada dapat diperoleh manfaat yang optimal. *Profitability* mempersoalkan perbandingan antara input dan output kebijakan. Sedangkan *efisiensi* biaya mempersoalkan apakah tujuan dapat dicapai dengan biaya yang minimal.

3. Kelayakan Politik (*Political Viability*)

Kriteria ini mencakup sub-kriteria : tingkat penerimaan, kepantasan, daya tanggap, legal dan keadilan. Tingkat

penerimaan adalah apakah alternatif kebijakan yang bersangkutan dapat diterima oleh para aktor politik dan masyarakat. Kepantasan mempersoalkan apakah kebijakan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Daya tanggap menanyakan apakah kebijakan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Legal adalah apakah kebijakan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Aspek keadilan menanyakan apakah kebijakan tersebut dapat mempromosikan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

4. Kelayakan Administratif (*Administrative Operability*)

Kriteria ini mencakup otoritas, komitmen institusi, kapasitas dan dukungan organisasi. Otoritas mempersoalkan apakah organisasi pelaksana kebijakan cukup memiliki otoritas.

Komitmen institusi menyangkut komitmen dari para administrator dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kapasitas berkenaan dengan kemampuan aparatur baik kemampuan konseptual maupun ketrampilan (*skill*). Dukungan organisasi adalah ada tidaknya dukungan dari organisasi pelaksana.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, sehingga desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Upaya dari penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi (Pasolong, 2012 : 75). Desain ini digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan pada fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka lokus dari penelitian akan

dilaksanakan di Kabupaten Tegal, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan lokasi-lokasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian yang ada di Kabupaten Tegal. Teknik pemilihan informan menggunakan sistem *Purposive Sampling* yang meliputi : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Beracun dan Berbahaya (B3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Kepala Dusun di Kabupaten Tegal, Petugas Kebersihan dan Masyarakat Kabupaten Tegal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis domain yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011 : 256).

Aktivitas dalam analisis data tersebut antara lain reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik validitas yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal

Berikut merupakan pembahasan tentang pendeskripsian pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal menggunakan teori Ketepatan Implementasi menurut Riant Nugorho yang terbagi dalam lima tepat yakni 1) Tepat Kebijakan, 2) Tepat Pelaksana, 3) Tepat Target, 4) Tepat Lingkungan dan 5) Tepat Proses.

1. Tepat Kebijakan

Berdasar hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di

Kabupaten Tegal masih belum dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi yakni masalah jumlah sampah yang dari waktu ke waktu semakin bertambah dan jumlah sampah yang dikelola tidak dapat mencapai 50% dari jumlah keseluruhan sampah yang ada.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal juga belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan yakni mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tegal dan sasarnya adalah dapat mengurangi dan mengangkut jumlah sampah sampai melebihi 50% dari total jumlah sampah yang ada.

2. Tepat Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, didapat bahwa ada aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di

Kabupaten Tegal. Adapun aktor-aktor tersebut yakni pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, swasta dan juga masyarakat. Aktor-aktor tersebut memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal.

3. Tepat Target

Target dari Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal yaitu dapat mengurangi dan mengangkut sampah sampai lebih dari 50% dari total jumlah yang ada dan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) dengan luas wilayah yang terbatas dapat menampung jumlah sampah yang dihasilkan. Namun, target yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal masih belum tercapai secara maksimal.

4. Tepat Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapat bahwa

pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup mempunyai otoritas untuk membuat dan melaksana kebijakan umum dan teknis serta mengelola dan menggunakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal.

Masyarakat sendiri memiliki persepsi tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal belum baik sebab sungai yang penuh dengan sampah dan petugas yang tidak rutin mengangkut sampah sehingga tempat sampah selalu penuh dengan sampah.

5. Tepat Proses

Alur proses pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal dimulai dari sampah rumah tangga yang dibuang oleh masing-masing warga ke tempat sampah yang sudah tersedia, kemudian petugas mengangkut sampah tersebut menuju Tempat

Pembuangan Sementara (TPS). Sampah yang terkumpul di TPS diangkut kembali menuju Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) dan terakhir sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Namun, alur proses pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal belum efektif. Alasan dari Dinas Lingkungan Hidup karena armada sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai dan personil petugas yang masih belum mencukupi, sementara masyarakat menilai alur proses pelaksanaan pengelolaan sampah belum efektif karena petugas kebersihan yang tidak rutin mengangkut sampah yang ada di tempat sampah pemukiman masyarakat.

2. Merumuskan Alternatif Kebijakan Terbaik dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal

1. Formulasi Masalah Kebijakan

Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal adalah jumlah sampah yang dari waktu ke waktu semakin bertambah serta pengelolaan jumlah sampah tidak dapat mencapai 50% dari jumlah keseluruhan sampah yang ada.

Adapun faktor penyebab terjadinya masalah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal disebabkan oleh : 1) Armada sarana dan prasarana yang belum memadai, 2) Terbatasnya dana anggaran, 3) Petugas kebersihan yang belum cukup memadai dan 4) Tingkat kesadaran masyarakat akan peduli sampah masih rendah.

2. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal adalah menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sasarannya

adalah dapat mengurangi dan mengangkut jumlah sampah sampai melebihi 50% dari total jumlah sampah yang ada.

3. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

1. Kriteria Kelayakan Teknis

Hal yang ingin dicapai dari adanya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal adalah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi lebih baik lagi.

2. Kriteria Kemungkinan Ekonomi dan Finansial

Menggunakan sumber daya yang tersedia saat ini dan biaya yang minimal, tujuan yang ingin diinginkan masih belum dapat tercapai.

3. Kriteria Kelayakan Politik

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal mendapatkan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan

masyarakat karena tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku serta pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta tidak tercemar sebagai tempat tinggal karena hal ini merupakan salah satu kebutuhan masyarakat.

4. Kelayakan Administratif

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai otoritas untuk membuat dan melaksana kebijakan umum dan teknis serta mengelola dan menggunakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang sudah tertuang di dalam visi dan misi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

4. Mencari Alternatif-Alternatif

1. Alternatif kebijakan penambahan dan peningkatan kualitas armada sarana dan prasarana

Dampak yang ditimbulkan dari segi teknis adalah armada sarana dan prasarana pengelolaan sampah bertambah banyak dan kualitas dari armada mengalami peningkatan yang akan mengakibatkan pencapaian tujuan yang diinginkan dan pemecahan masalah yang dihadapi. Dari segi ekonomi akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal menjadi bengkak dan mungkin retribusi dari pelayanan pengelolaan sampah menjadi naik.

Dari segi politik, terjadi pemerataan dan keadilan bagi daerah-daerah yang belum memiliki sarana dan prasarana

pengelolaan sampah. Dari segi administratif, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki otoritas penuh dalam menggunakan armada sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

2. Alternatif kebijakan penambahan jumlah personil petugas kebersihan

Dampak yang ditimbulkan dari segi teknis adalah petugas kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal bertambah banyak dan kualitas dari petugas kebersihan menjadi lebih baik. Dari segi ekonomi membutuhkan anggaran dana yang besar karena jika petugas kebersihan bertambah maka alokasi dana sebagai gaji petugas kebersihan semakin bertambah.

Dari segi politik, terjadi pemerataan dan keadilan bagi daerah-daerah yang jarang didatangi oleh petugas kebersihan untuk mengangkut

sampah di daerah tersebut. Dari segi administratif, terjadinya perbaikan dalam hal kapasitas dari para petugas kebersihan.

3. Alternatif kebijakan menambah jumlah anggaran alokasi untuk pengelolaan sampah

Dampak yang ditimbulkan dari segi teknis adalah penambahan jumlah armada sarana dan prasarana serta petugas kebersihan pengelolaan sampah. Disertai dengan peningkatan kualitas dari armada sarana dan prasarana dan petugas kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Dari segi ekonomi akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal menjadi bengkak, namun retribusi pelayanan sampah ditingkatkan.

Dari segi politik, terjadi pemerataan dan keadilan bagi daerah-daerah di Kabupaten Tegal yang jauh dan memiliki

akses yang sedikit. Dari segi administratif, hanya Dinas Lingkungan Hidup saja yang memiliki otoritas untuk mengelola anggaran dana tersebut.

4. Alternatif kebijakan pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak peduli akan sampah

Dampak yang ditimbulkan dari segi teknis adalah menyiapkan peraturan tentang sanksi membuang sampah sembarangan tempat. Dari segi ekonomi adalah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tegal.

Dari segi politik, peraturan tentang sanksi membuang sampah sembarangan tempat mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dari segi administratif adalah Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan intervensi tegas kepada masyarakat yang

melanggar peraturan yang dibuat.

5. Memutuskan Alternatif Kebijakan Terbaik

Alternatif kebijakan menambah anggaran alokasi pengelolaan sampah merupakan alternatif kebijakan terbaik. Hal ini karena melihat kondisi dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang belum efektif karena disebabkan oleh armada sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum memadai serta jumlah personil petugas kebersihan yang masih kurang. Adanya penambahan anggaran alokasi pengelolaan sampah, maka dapat mempermudah dalam menambah dan meningkatkan kualitas dari armada sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan personil petugas kebersihan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal belum efektif karena dari beberapa “tepat” yang ada di dalam teori Ketepatan Implementasi tidak sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal pada saat ini.

1. Faktor positif yang sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal yakni tepat pelaksana dan tepat lingkungan. Bahwa aktor-aktor pelaksana pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, swasta dan masyarakat sudah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing yang dimiliki. Tepat Lingkungan sudah sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal karena pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal mendapatkan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten

Tegal juga tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

2. Faktor negatif yang terjadi di lapangan dan tidak sesuai dengan teori Ketepatan Implementasi adalah Tepat Proses. Proses awal pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal dimulai dari sampah rumah tangga yang dibuang oleh masing-masing warga ke tempat sampah yang sudah tersedia, kemudian petugas mengangkut sampah tersebut menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sampah yang terkumpul di TPS diangkut kembali menuju Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) dan terakhir sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, alur proses pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi tidak jelas atau terganggu karena masyarakat menilai petugas kebersihan yang tidak rutin mengangkut sampah yang ada di tempat sampah pemukiman masyarakat.

Faktor negatif lainnya adalah Tepat Kebijakan. Masalah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal yakni masalah jumlah sampah yang dari waktu ke waktu semakin bertambah dan jumlah sampah yang dikelola tidak dapat mencapai 50% dari jumlah keseluruhan sampah yang ada belum dapat diselesaikan.

Terakhir faktor negatif lainnya yakni Tepat Target. Target dari pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal adalah dapat mengurangi dan mengangkut sampah sampai lebih dari 50% dari total jumlah sampah belum dapat tercapai secara maksimal.

Tahapan proses analisis kebijakan menurut Brigman dan Davis yakni :

1. Formulasi Masalah Kebijakan

Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal adalah jumlah sampah yang dari waktu ke waktu semakin bertambah serta pengelolaan jumlah sampah tidak dapat mencapai 50% dari jumlah keseluruhan sampah yang ada.

Adapun faktor penyebab terjadinya masalah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal disebabkan oleh : 1) Armada sarana dan prasarana yang belum memadai, 2) Terbatasnya dana anggaran, 3) Petugas kebersihan yang belum cukup memadai dan 4) Tingkat kesadaran masyarakat akan peduli sampah masih rendah.

2. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal adalah menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sasarannya adalah dapat mengurangi dan mengangkut jumlah sampah sampai melebihi 50% dari total jumlah sampah yang ada.

3. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

Mengidentifikasi parameter kebijakan adalah kegiatan melakukan tes atau pengujian

terhadap permasalahan yang akan terjadi. Dalam melakukan seleksi terhadap alternatif-alternatif kebijakan digunakan kriteria Bardach yang terdiri atas beberapa kriteria yaitu : 1) Kelayakan Teknis, 2) Kemungkinan Ekonomi dan Finansial, 3) Kelayakan Politik dan 4) Kelayakan Administratif.

4. Mencari Alternatif-Alternatif

Ada beberapa alternatif kebijakan dalam menangani permasalahan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal yaitu :

- 1) Alternatif kebijakan penambahan dan peningkatan kualitas armada dan sarana pengelolaan sampah bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar para petugas dalam bekerja sehingga sampah yang dikelola akan semakin bertambah banyak.
- 2) Alternatif kebijakan penambahan jumlah personil petugas kebersihan bertujuan untuk menjangkau keseluruhan tempat akses pelaksanaan

pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal sehingga sampah yang ada di Kabupaten Tegal dapat diangkut dan dikelola seluruhnya.

- 3) Alternatif kebijakan menambah jumlah anggaran alokasi bertujuan untuk mengatasi kurang dan rusaknya armada sarana dan prasarana pelayanan pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan dengan anggaran dana yang besar, maka armada sarana dan prasarana yang masih kurang dapat ditambah dan armada yang rusak dapat diperbaiki atau diganti dengan yang baru apabila kondisi kerusakan sudah terlalu parah.
- 4) Alternatif kebijakan pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak peduli akan sampah bertujuan agar seluruh masyarakat sadar akan bahaya sampah jika dibuang sembarangan tempat. Diharapkan tentunya dengan adanya sanksi membuat

masyarakat semakin peduli dengan lingkungan.

5. Memutuskan Alternatif Kebijakan Terbaik

Alternatif kebijakan menambah anggaran alokasi pengelolaan sampah merupakan alternatif kebijakan terbaik. Hal ini karena melihat kondisi dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang belum efektif karena disebabkan oleh armada sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum memadai serta jumlah personil petugas kebersihan yang masih kurang. Adanya penambahan anggaran alokasi pengelolaan sampah, maka dapat mempermudah dalam menambah dan meningkatkan kualitas dari armada sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan personil petugas kebersihan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut antara lain:

1. Permasalahan mengenai alur proses pelaksanaan sampah. Alur

proses pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi tidak jelas atau terganggu karena masyarakat menilai petugas kebersihan yang tidak rutin mengangkut sampah yang ada di tempat sampah pemukiman masyarakat dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pemberian sanksi atau teguran keras kepada petugas yang tidak mengangkut sampah ke daerah desa.
 - b. Melakukan pembagian daerah tugas yang jelas kepada petugas kebersihan.
 - c. Menambah personil petugas kebersihan agar dapat menjangkau daerah yang aksesnya minim.
2. Alternatif kebijakan yang terpilih adalah alternatif kebijakan menambah anggaran alokasi pengelolaan sampah. Walaupun sudah terpilih, belum tentu alternatif kebijakan tersebut langsung dilaksanakan karena ada banyak pertimbangan. Agar alternatif kebijakan dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya

sesuai dengan keinginan kita, maka alternatif kebijakan tersebut harus didukung oleh skenario implementasi. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan agar alternatif kebijakan dapat dilaksanakan :

- a. Dengan pengertian bahwa pihak yang satu memerlukan suatu kondisi tertentu yaitu kebutuhan dan keinginan, dan dilain pihak memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut manusia memiliki keterbatasan, dan keterbatasan tersebut merupakan peluang bagi pihak lain untuk membantu memenuhinya.
- b. Mengidentifikasi problem-
problem dalam peluang-
peluang.
- c. Menemukan jalan untuk menyusun ulang masalah negatif menjadi kesempatan potensial dan membuka kesempatan baru untuk pengembangan.

- d. Membuat, menentukan dan mengembangkan peluang-
peluang yang dapat diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdulkaar dan Teguh Yuwono. 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang: Undip Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh: Samodra dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Makmur dan Thahier, R. 2016. Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi terhadap Kebijakan Publik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- _____. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong. 2012. Metode Penelitian Administasi Publik. Bandung: Alfabeta.

- Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono A G. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta
- . 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Ombak.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.